

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PURWAKARTA

PEMERINTAH KABUPATEN KABUPATEN PURWAKARTA



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PERENCANA AHLI MUDA

Nomor SOP		:	000.0.3,3/1248/DLH (2024)
Tanggal	Pembuatan	:	30 Agustus 2029
Tanggal	Revisi	:	KABUPA
Tanggal Efektif		:	15 C
Disahka	n Oleh	:	H.DICKY DARMAWAN, SH M. Hum NIP. 19670502 199203 1 009
Nama So	OP	:	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

PERENCANA AHLI MUDA		NIP. 19670502 199203 1 009			
I DIONOMIA MIDI MODA	Nama SOP :	: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)			
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksanaan :				
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akunsibilitas Kinerja Instansi Pemerintah;	1. Kepala	: Eselon II.b, Pendidikan Minimal Lulusan S2			
2. Peraturan Materi Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan	2. Sekretaris	: Eselon III.a, Pendidikan Minimal Lulusan S1			
Pelaporan Akunsibilitasi Kinerja Instansi Pemerintah; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Tata	3. Analis Perencana Ahli Muda	: Eselon IV.a, Pendidikan Minimal Lulusan S			
Cara Penyusunan Dokumen Perencana Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah; 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi	4. Pelaksana	: Pendidikan minimal SMA/SMK			
Perangkat Daerah;					
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Kabupaten Purwakarta Tahun 2018-2023;					
6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaa Pembangunan Daerah.					
7. Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;					
8. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purwakarta.					
Keterkaitan:	Peralatan/Perlengkapan:				
1. SOP Surat Masuk	1. Renstra LINGKUNGAN HIDUP	P. 4. Laporan Keuangan			
2. SOP Surat Keluar 3. SOP Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah	2. DPA LINGKUNGAN HIDUP	5. Laporan Pelaksanaan			

3. SOP Penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah Stempel 3. Penetapan Kinerja LINGKUNGAN HIDUP Stempel Program/Kegiatan 6. Alat Tulis Kantor 7. Komputer 8. Printer Peringatan: Keterlambatan Penyusunan LAKIP SKPD Berakibat Keterlambatan Penyusun LAKIP Pemerintah Daerah LAKIP SKPD Merupakan Acuan Dalam Penyusunan LAKIP Kabupaten

BAGAN ALUR PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

No		PELAKSANA				MUTU BAKU		
	URAIAN PROSEDUR	Sekertaris	Pelaksana	Perencana Ahli Muda	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output
1	Menerima disposisi Kepala tentang SE Penyusun LAKIP					Surat Edaran Sekda	15 Menit	Undangan Rakor Internal Penyusunan LAKIP
2	Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang, Kepala Sub Bidang dan kepala Sub Bagian Meminta data					Surat Internal Koordinasi Penyusunan LAKIP	2 Jam	Data LAKIP dari Bidang-bidang
3	Menerima Data dari kepala Bidang, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Sub Bagian	Total Control And Control Control	*	Tidak		Data LAKIP dari Bidang-bidang	5 Hari	Rekap data LAKIP dari Bidang-bidang
4	Memverifikasi dan mengolah data	Tidak		-		Rekap data LAKIP dari Bidang-bidang	2 Hari	Draft LAKIP
5	Mengoreksi dan Memaraf LAKIP			Ya		Draft LAKIP	45 menit	LAKIP
6	Menandatangani LAKIP	Ya				LAKIP	20 menit	Dokumen LAKIP
7	Menerima LAKIP yang sudah ditandatangani Kepala, menyerahkan ke Sub Bagian Program untuk digandakan, diarsipkan dan dikirim ke instansi terkait			(Dokumen LAKIP	60 menit	Dokumen LAKIP